

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergolakan yang terjadi antara Tibet dan Tiongkok merupakan gangguan keamanan yang terjadi karena protes rakyat Tibet atas berbagai kebijakan Pemerintah Tiongkok yang dinilai tidak tepat untuk Tibet, meski pemerintah dan rakyat Tiongkok menganggapnya benar demi kemakmuran dan perkembangan Tibet. Dalam konflik antara Tibet dan Tiongkok ini, Dalai Lama yang merupakan seorang pemimpin agama di Tibet, melakukan berbagai upaya demi memperjuangkan hak negaranya.¹ Upaya diplomasi yang dilakukan Dalai Lama digolongkan sebagai upaya *citizen diplomacy*, dikarenakan status Dalai Lama saat ini bukan lagi pemimpin negara yang bertanggung jawab atas persoalan politik Tibet seperti sebelumnya. Akan tetapi di dalam pemerintahan Tibet di pengasingan, status Dalai Lama merupakan simbol negara sebagai seorang pemimpin agama yang dimuliakan. Posisi Dalai Lama ini berubah setelah pernyataan pensiun oleh Dalai Lama pada Maret 2011.²

Tibet dipimpin oleh seorang Dalai Lama secara turun temurun dengan bentuk pemerintahan internal yang menganut sistem teokrasi di mana negara diatur oleh para pemimpin agama. Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14, merupakan pemimpin spiritual di Tibet dan memiliki otoritas yang tinggi terhadap semua keputusan. Menurut

¹ Ridwan, "Status Tibet yang Diperdebatkan," *Kabar Indonesia*, 21 Maret 2008, diakses pada 29 Januari 2017
<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=1&jd=Status+Tibet+yang+Diperdebatkan&dn=2008321035530>

² His Holiness The 14th Dalai Lama of Tibet, "His Holiness the Dalai Lama's Remarks on Retirement", <https://www.dalailama.com/the-dalai-lama/biography-and-daily-life/retirement/retirement-remarks>, diakses pada 14 September 2017

kepercayaan Buddha, Dalai Lama adalah inkarnasi duniawi dari *Avalokiteshvara* atau Chenrezig, *Bodhisattva* belas kasih dan santo pelindung Tibet. Dalam tradisi Buddhis, *Bodhisattva* adalah makhluk tercerahkan yang memilih kelahiran kembali, daripada pindah ke akhirat, dalam rangka untuk melayani kemanusiaan. Dengan demikian, Dalai Lama dianggap sebagai pemimpin spiritual Tibet dan salah satu pemimpin Budhisme paling penting di mana saja. Oleh karena itu keputusan atau tindakan yang diambil oleh Dalai Lama mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat Tibet walaupun ia tidak berada di Lhasa Tibet.³

Dalam konflik ini Dalai Lama berusaha mengambil jalan tengah atas permasalahan Tiongkok dengan Tibet. Dalai Lama tidak lagi menuntut kemerdekaan tetapi suatu otonomi khusus yang menjamin hak-hak otonom etnis Tibet dengan kebebasan agama dan kebudayaan. Solusi masalah Tibet ini hanya dimungkinkan jika Tiongkok lebih membuka diri untuk berdialog dan Dalai Lama mempersiapkan komunitasnya untuk siap berunding. Karena Tiongkok adalah sebuah negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat sehingga tidak mudah untuk digertak, oleh sebab itu berdialog dengan Tiongkok merupakan salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah ini.⁴

Hubungan Tiongkok dan Tibet mulai memanas pada tahun 1950, di mana Pemerintah Tiongkok mengirim Tentara Pembebasan Rakyat (*People Liberation Army/PLA*) sebanyak 80.000 pasukan menuju perbatasan Tibet serta menguasainya

³ NBCNEWS, "Q&A: The Dalai Lama, Tibet and China". <http://www.nbcnews.com/id/21321374/>. Diakses pada 29 Januari 2017

⁴ *Ibid.*

dan memaksa Dalai Lama untuk mundur dari kekuasaannya.⁵ Keputusan untuk menggunakan kekuatan militer dalam melakukan pendudukan terhadap Tibet pun diambil atas pertimbangan bahwa Tibet sangat kondusif bagi strategi menghadapi kekuatan internasional. Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengetahui bahwa walaupun secara *de facto* Tibet independen sejak tahun 1911 hingga 1950, masyarakat internasional secara formal tidak mengakui Tibet sebagai negara merdeka.⁶ Pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Tibet pun pecah pada Maret 1959 ketika PLA hendak menangkap Dalai Lama guna menguasai Tibet sepenuhnya. Atas kejadian ini, Dalai Lama pun kemudian diasingkan ke Dharamsala, India, yang kemudian oleh banyak orang disebut Lhasa Kecil.⁷

Masalah Tibet mengemuka lagi pada Maret 2008 yang bertepatan dengan peringatan 49 tahun Perlawanan Tibet terhadap invasi Tiongkok. Kerusuhan yang menewaskan 22 orang ini terjadi karena masyarakat Tibet merasa gerakan Tiongkok untuk menekan Tibet semakin kuat semenjak Tiongkok menjadi raksasa ekonomi Asia. Tiongkok membatasi gerak-gerik rakyat Tibet seperti melarang menggunakan bahasa asli Tibet dan memaksa menggunakan bahasa Tiongkok, melarang untuk memperkenalkan budaya Tibet pada wisatawan yang datang ke Tibet, dan masyarakat Tibet cenderung tidak mendapatkan perlindungan.⁸

⁵ Allem Carlson, *Beijing's Tibet Policy: Securing Sovereignty and Legitimacy*, (Washington D.C.: East-West Center, 2004), 10-13.

⁶ Edgar Snow, *Red Star over Tiongkok*, (New York: Grove Weidenfeld, 1968), 226.

⁷ Nurani Soyomukti, *Revolusi Tibet: Fakta, Intrik Dan Politik Kepentingan Tibet-Cina-Amerika Serikat*, (Yogyakarta: Garasi, 2008), 82.

⁸ Jun Chang dan Jon Holliday, *MAO, Kisah-kisah yang tidak diketahui*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 595.

Menjelang peringatan 50 tahun pemberontakan Tibet, berbagai aksi anti-Tiongkok pun meluas akibat dari pernyataan Dalai Lama dalam pidatonya yang kembali menuntut otonomi khusus bagi Tibet, “Kami rakyat Tibet tengah memperjuangkan otonomi khusus tetapi tetap dalam kerangka Republik Rakyat Tiongkok. Saya percaya seluruh rakyat Tibet akan mendapatkan keadilan”. Dalai Lama juga menuding bahwa Pemerintah Tiongkok membawa “neraka dunia” ke Tibet yang kemudian menghancurkan dan membuat rakyat Tibet menderita sampai sekarang.⁹

Pernyataan Dalai Lama tersebut kemudian dibantah oleh Pemerintah Tiongkok yang melalui juru bicara Departemen Luar Negeri Tiongkok, Ma Zhaoxu, menyatakan, “Saya tidak akan menanggapi kebohongan Dalai Lama. Kelompok Dalai Lama memutarbalikkan fakta. Mereka menyebarkan berita tidak benar. Reformasi demokrasi Tibet (di bawah kepemimpinan Tiongkok) termasuk yang paling luas dan mendalam dalam sejarah Tibet.” Pejabat Tiongkok di Tibet, Qiangba Puncong, juga menambahkan bahwa,

Kelompok Dalai Lama kerap mengutarakan kebohongan atau berita tak benar tentang pemerintah selama 50 tahun terakhir. Mereka selalu menyebarluaskan berita bohong bahwa ada lebih dari satu juta warga Tibet tewas dibunuh selama 50 tahun terakhir. Padahal, populasi Tibet melonjak dari 1,2 juta jiwa pada tahun 1959 menjadi 2,87 juta jiwa tahun 2008. Dalai Lama juga sering berbohong dengan mengatakan telah terjadi genosida di Tibet. Hal itu menjadi strategi kelompok Dalai Lama untuk membohongi dunia. Pengambil alihan Tibet oleh Tiongkok justru bertujuan membebaskan rakyat Tibet yang diperbudak teokrasi feodal Tibet selama berabad-abad. Dalam 50

⁹AFD, “Dalai Lama: Tiongkok Membawa Neraka Dunia ke Tibet,” Kompas, 11 November 2009, diakses pada 20 Mei 2017
<http://internasional.kompas.com/read/2009/03/11/08195372/Dalai.Lama.Tiongkok.Membawa.Neraka.Dunia.ke.Tibet>

tahun terakhir, rakyat Tibet menyaksikan perubahan ekonomi, politik, dan budaya¹⁰

Terdapat perbedaan laporan pada jumlah dan identitas mereka yang tewas selama awal demonstrasi yang terjadi pada 31 Maret 2008, sumber resmi Tiongkok dilaporkan mengklaim bahwa 18 telah meninggal, sedangkan pemerintah Tibet di pengasingan mengklaim 140 dilaporkan telah meninggal.¹¹ Berdasarkan sejumlah laporan yang tidak pasti kebenarannya, yang tewas termasuk kedua Tibet dan etnis Han Tiongkok pedagang, beberapa sisanya dilaporkan telah ditembak oleh polisi, dan beberapa yang terakhir dilaporkan telah mati di tempat-tempat kebakaran yang dilakukan oleh massa. Menurut laporan berita, pada 16 Maret 2008, Pemerintah TAR (*Tibet Autonomous Region*) mengumumkan "perang rakyat" di Tibet. Seolah-olah untuk menghilangkan dukungan untuk Dalai Lama dan menghilangkan aspirasi dari masyarakat Tibet untuk merdeka.¹² Perbedaan jumlah pasti korban kerusuhan di Tibet tidak menghentikan Tiongkok untuk tetap melakukan kekerasan terhadap rakyat Tibet yang melakukan perlawanan sampai saat ini.¹³

Konflik ini penting untuk dibahas, karena didalamnya terdapat banyak pelanggaran HAM oleh Tiongkok terhadap masyarakat Tibet yang berusaha untuk melawan Tiongkok. Tibet pun mengalami perubahan di bidang sosial, perubahan sosial tersebut sering disebut pengubahan demokratik dan juga suatu pengubahan besar dalam sejarah HAM di Tibet. Rakyat Tibet yang merupakan 95% dari total

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Kerry Dumbaugh, "*Tibet: Problems, Prospects, and US Policy*". Congressional Research Service Report fo Congress, 2008, 27.

¹² *Ibid.*, 30.

¹³ Free Tibet, *Human Rights in Tibet*, <https://freetibet.org/about/human-rights> , diakses pada 20 Mei 2017

penduduk Tibet tidak memiliki hak apapun, khususnya kaum wanitanya diperlakukan seperti hewan.¹⁴

Tidak hanya itu, migrasi Etnis Han juga menjadi salah satu akar permasalahan yang berujung tindakan brutal Militer Tiongkok. Pembantaian, pembakaran hidup-hidup, menjadi tindakan Tiongkok yang sangat melanggar hak-hak orang Tibet.¹⁵

Tindakan Pemerintah Tiongkok ini mengundang protes dari Amerika Serikat dan mendesak Pemerintah Tiongkok untuk memperbaiki masalah-masalah HAM di Tibet.¹⁶

Alasan Tiongkok menginvasi Tibet dikarenakan Tibet dikenal kaya akan sumber daya mineral di mana terdapat 90 jenis sumber daya mineral dan 30 jenis di antaranya telah ditemukan dan terbukti sebagai sumber daya cadangan, namun provinsi ini mengalami kesulitan dalam memanfaatkannya.¹⁷ Hasil penelitian terbaru mengungkapkan bahwa ada cadangan besar elemen lithium dan bumi langka di bagian-bagian tertentu di Tibet. Menurut mantan Ketua Partai Komunis Tiongkok, Yin Fatang, bahwa pasokan terbesar uranium di dunia terkunci di wilayah Himalaya Tibet.¹⁸

Sumber daya alam yang dimiliki Tibet tersebut hanya sedikit yang telah dimanfaatkan karena tidak dapat diakses, kurangnya kapasitas industri, dan

¹⁴ Asia Calling, "TIBET: Kehidupan Beragama Di Tibet Terancam Di Bawah Rezim Komunis Tiongkok", <http://asiacalling.kbr68h.com/index.php/archives/294> , diakses pada 29 Januari 2017

¹⁵ Dalai Lama, *Negeriku & Rakyatku*. (Jakarta: Kadam Choeling, 2011). 22

¹⁶ Jayshree Bajoria, *The Question of Tibet*,

http://www.cfr.org/publivation/15965/question_of_tibet.html, diakses pada 14 April 2017

¹⁷ UNESCAP, "Tibet".

<http://www.unescap.org/esid/psis/population/database/Tiongkokdata/tibet.htm#pop> , diakses pada 14 April 2017

¹⁸ Central Tibetan Administration, "Environment and Development Issues", <http://tibet.net/important-issues/tibets-environment-and-development-issues/> , diakses pada 14 April 2017

peringatan Buddha untuk tidak mengganggu bumi karena takut merugikan makhluk hidup. Namun daya tarik paling abadi adalah bahwa Tibet merupakan lokasi yang digunakan sebagai zona penyangga antara Tiongkok dan India. Tibet sebagai kawasan yang strategis bagi Tiongkok karena Tibet merupakan wilayah yang penting bagi kepentingan pertahanan nasional atau militer Tiongkok karena berbatasan dengan India, Bhutan, Nepal, dan Sikkim.¹⁹ Hal tersebut lah yang menyebabkan Tiongkok melakukan invasi ke Tibet.

Alasan lain mengapa Tiongkok ingin tetap mempertahankan Tibet diantaranya adalah karena faktor sejarah di mana pada saat Tiongkok berada di bawah kepemimpinan Mao Zedong yang ingin menunjukkan kemampuan rezim komunisnya kepada dunia dengan menaklukkan Tibet. Selain itu juga dikarenakan Tibet merupakan kawasan strategis bagi Tiongkok yang penting bagi kepentingan pertahanan nasional Tiongkok. Kemudian Tiongkok ingin mengubah Tibet menjadi wilayah yang memiliki basis militer dan memodernisasikan Tibet dengan menghilangkan nilai-nilai keagamaan Tibet.²⁰

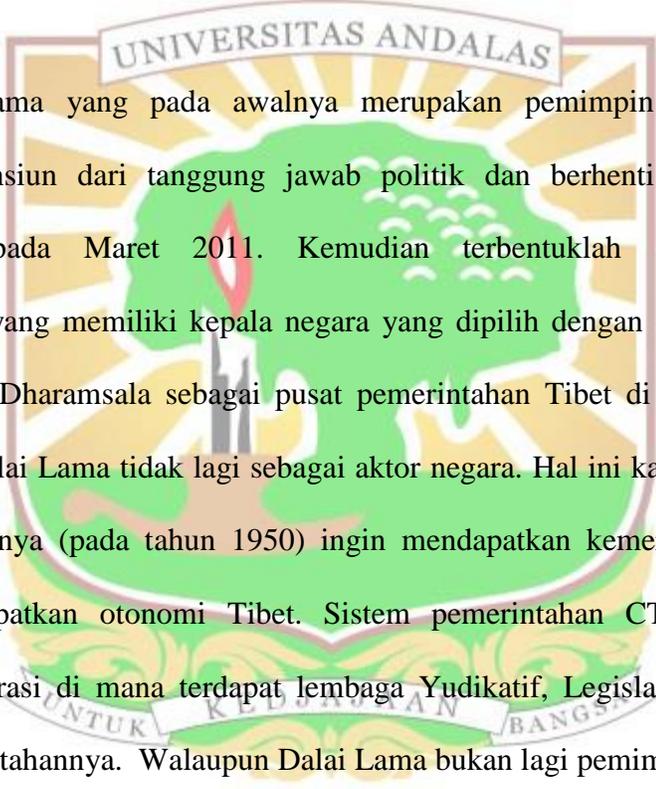
Konflik antara Tibet dan Tiongkok mendapat tanggapan dan dukungan masing-masing kepada Tibet maupun Tiongkok. Setidaknya ada lebih dari 100 negara yang mendukung Pemerintah Tiongkok untuk menyelesaikan masalah di Tibet sesuai

¹⁹ W. Gary Vause, *Tibetan to Tiananmen: Chinese Human Rights and United States Foreign Policy*, (USA: Maryland, 1989). 56

²⁰ Atika Tursiana, "Analisis Dinamika Konflik Antara Tiongkok Dan TibeT", Jurnal hal 1104, FISIP Universitas Mulawarman.

dengan undang-undang dan ketentuan serta kebijakan pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara.²¹

Dalam konflik Tibet dan Tiongkok ini, banyak negara yang berpartisipasi untuk membantu Tibet dalam menyelesaikan konflik ini. Partisipasi dari dunia internasional adalah salah satu hasil dari perjalanan Dalai Lama ke negara-negara barat yang merupakan upaya diplomasi yang dilakukannya untuk mendapatkan otonomi Tibet.²²



Dalai Lama yang pada awalnya merupakan pemimpin tertinggi Tibet, menyatakan pensiun dari tanggung jawab politik dan berhenti menjadi bagian pemerintahan pada Maret 2011. Kemudian terbentuklah *Central Tibetan Administration* yang memiliki kepala negara yang dipilih dengan sistem demokrasi yang berada di Dharamsala sebagai pusat pemerintahan Tibet di pengasingan. Ini berarti status Dalai Lama tidak lagi sebagai aktor negara. Hal ini karena tujuan Tibet yang pada awalnya (pada tahun 1950) ingin mendapatkan kemerdekaan, berubah menjadi mendapatkan otonomi Tibet. Sistem pemerintahan CTA pun berubah menjadi Demokrasi di mana terdapat lembaga Yudikatif, Legislatif dan Eksekutif didalam pemerintahannya. Walaupun Dalai Lama bukan lagi pemimpin negara Tibet, Dalai Lama masih tetap pada tujuannya yaitu untuk membela hak rakyat Tibet. Dalai

²¹ Antara, "100 negara Dukung Tiongkok Selesaikan Masalah Tibet", <http://www.antara.co.id/arc/2008/3/25/100-negara-dukung-Tiongkok-selesaikan-masalah-tibet/>, diakses pada 14 April 2017

²²Nurani Soyomukti, *Revolusi Tibet: Fakta, Intrik Dan Politik Kepentingan Tibet-Cina-Amerika Serikat*, (Yogyakarta: Garasi, 2008), 64.

Lama tetap melakukan upaya diplomasi untuk mendapatkan otonomi Tibet sebagai agen *Citizen Diplomacy* dengan mengunjungi negara-negara.²³

Dalai Lama ke-14 banyak melakukan upaya-upaya dengan Tiongkok untuk perdamaian. Sampai pada akhirnya Dalai Lama ingin mengupayakan jalan tengah (*middle way*) yaitu pemberian hak otonom pada Tibet untuk menyelesaikan masalah dalam negerinya sendiri. Namun, pihak Tiongkok tetap menolak dan menuduh Dalai Lama adalah pimpinan separatis Tibet. Namun, Dalai Lama tidak putus asa untuk mengupayakan hak otonom ini. Dengan melakukan perjalanan keliling dunia, agar dunia mendukung Dalai Lama dalam memperjuangkan hak otonom Tibet.²⁴

Opsi jalan tengah yang diusulkan oleh Dalai Lama untuk menyelesaikan konflik antara Tiongkok dan Tibet dimaksudkan akan membawa stabilitas untuk masyarakat Tiongkok dan Tibet berdasarkan kesetaraan dan saling kerjasama. Masyarakat Tibet saat ini tidak menerima status Tibet yang berada di bawah kepemimpinan Tiongkok. Namun, disisi lain masyarakat Tibet juga tidak menuntut kemerdekaan atas Tiongkok. Menurut Dalai Lama bagi Tibet keharmonisan dan kesetaraan antara Tibet dan Tiongkok lebih penting daripada jika harus terus berkonflik oleh karena itu masyarakat Tibet menyetujui pendekatan opsi jalan tengah.²⁵

²³His Holiness The 14th Dalai Lama of Tibet, "The Dalai Lama: Brief Biography", <https://www.dalailama.com/the-dalai-lama/biography-and-daily-life/brief-biography> , diakses pada 24 Agustus 2017

²⁴ His Holiness The 14th Dalai Lama of Tibet, "His Holiness's Middle Way Approach for Solving the Issues of Tibet", <http://www.dalailama.com/middle-way-approach>. Diakses pada 14 September 2017

²⁵ *Ibid.*

Meski Tiongkok kerap menghujat Dalai Lama dalam melakukan kunjungan ke negara-negara dunia, Dalai Lama masih tetap mendapat dukungan kuat dari para pengikut Buddha di seluruh dunia. Negara-negara itu pada umumnya mengancam dan mendesak Tiongkok untuk secepatnya menyelesaikan konfliknya dengan Tibet.²⁶

Tiongkok seringkali mengancam negara-negara yang menerima kedatangan Dalai Lama. Negara-negara yang pernah ikut andil mendukung Tibet diantaranya Inggris, Rusia, Mongolia, Australia, dan Amerika Serikat. Tapi beberapa negara memutuskan untuk berhenti memberikan dukungan terhadap Tibet dikarenakan hubungan negara-negara tersebut yang mulai membaik dengan Tiongkok. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lewat Sekjen Ban Ki-Moon, juga turut andil walau hanya sebatas memberikan seruan agar aksi kekerasan yang terjadi di Tibet dihentikan.²⁷

Sebagai seorang tokoh agama dan pemikir, reputasi Dalai Lama memang diakui oleh masyarakat di dunia. Sejak ia berkunjung untuk pertama kalinya ke dunia Barat pada tahun 1973, sejumlah universitas dan lembaga-lembaga di Barat menganugerahinya berbagai macam anugerah yang merujuk pada komitmennya pada perdamaian. Tak heran kemudian pada tanggal 10 Desember 1989, Dalai Lama mendapatkan penghargaan Hadiah Nobel, sebuah penghargaan berkelas dunia bagi para pengamal kedamaian.²⁸

²⁶ *Ibid.* , Nurani Soyomukti, 82.

²⁷ Nurani Soyomukti, *Revolusi Tibet: Fakta, Intrik Dan Politik Kepentingan Tibet-Cina-Amerika Serikat*, (Yogyakarta: Garasi, 2008), 34.

²⁸ *Ibid.*, 86.

Perjuangan Dalai Lama memanglah lama, tidak berhenti setelah ia mendapat penghargaan dunia dan berhenti dari tanggung jawab politiknya, Dalai Lama masih saja terus berjuang untuk mendapatkan otonomi Tibet. Walaupun hingga saat ini Tiongkok masih mempertahankan keyakinan bahwa Tibet secara historis merupakan bagian dari Tiongkok. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana upaya diplomasi Dalai Lama dalam mendapatkan otonomi Tibet dari Tiongkok.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik yang terjadi diantara Tibet dan Tiongkok merupakan konflik yang sudah terjadi sejak lama. Invasi pada tahun 1959 yang dilakukan oleh Tiongkok mengakibatkan diasingkannya pemimpin Tibet saat itu, Dalai Lama, ke Dharamsala, India. Selama Dalai Lama berada di pengasingan, Tiongkok bahkan tidak berhenti memberikan tekanan terhadap Tibet. Dalai Lama yang pada awalnya merupakan pemimpin tertinggi Tibet, menyatakan pensiun dari tanggung jawab politik dan berhenti menjadi bagian pemerintahan pada Maret 2011. Walaupun Dalai Lama sudah menyatakan dirinya berhenti, Dalai Lama tetap melakukan perjuangannya dalam mendapatkan otonomi Tibet dari Tiongkok. Atas upaya diplomasi Dalai Lama yang bukan lagi merupakan bagian dari pemerintahan, maka peran Dalai Lama dalam diplomasi berubah menjadi *citizen diplomacy*. Untuk itu, maka penelitian tentang bagaimana upaya diplomasi Dalai Lama untuk mendapatkan otonomi Tibet dari Tiongkok, merupakan hal yang perlu untuk dianalisis lebih lanjut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah *Bagaimana bentuk tipologi citizen diplomacy Dalai Lama dalam upayanya untuk mendapatkan otonomi Tibet dari Tiongkok?*

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tipologi *citizen diplomacy* Dalai Lama dalam upayanya untuk mendapatkan otonomi Tibet dari Tiongkok.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. Sebagai bekal, tambahan wawasan, dan latihan dalam memecahkan masalah bagi peneliti sebagai calon lulusan studi Hubungan Internasional.
- b. Memberikan referensi kepada pihak terkait dalam melihat permasalahan yang diteliti khususnya mengenai upaya dan peran individu dalam diplomasi.

1.6 Tinjauan Pustaka

Untuk menganalisis judul yang diangkat, peneliti berusaha untuk mencari acuan pada beberapa kajian pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya akan menjadi tolak ukur dan landasan bagi penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian.

Penelitian pertama yaitu yang ditulis oleh Atika Tursiana yang berjudul “Analisis Dinamika Konflik antara Tiongkok dan Tibet”²⁹. Atika menjelaskan bahwa ada alasan lain mengapa konflik Tiongkok dan Tibet sulit diselesaikan. Selain dikarenakan adanya masalah etnis, perbedaan persepsi antara Tiongkok dan Tibet juga menjadi alasan mengapa konflik ini sulit diselesaikan. Menurut persepsi Tibet, masalah yang terjadi diantara Tiongkok dan Tibet termasuk isu kemerdekaan dan kebebasan setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Atas dasar inilah Tibet mempertaruhkan hak mereka dan menekankan bahawa ini bukan gerakan separatis. Sedangkan menurut persepsi dari Tiongkok, masalah yang terjadi adalah isu nasionalisme, integritas, serta kedaulatan negara, sehingga Tiongkok menganggap Tibet melakukan gerakan separatis. Keinginan Tibet untuk melepaskan diri dan mendapatkan kemerdekaan dari Tiongkok inilah yang membuat Tiongkok merasa integritasnya terancam dengan adanya gerakan separatis ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah dari penggunaan konsep yang digunakan. Tulisan ini dapat membantu penulis untuk mengetahui dinamika dan penyebab konflik Tiongkok dan Tibet sulit untuk diselesaikan.

Kajian pustaka kedua adalah tulisan yang di tulis oleh Lidya Yohana Tanno Kakauhe yang berjudul “Diplomasi Dalai Lama XIV untuk Mendapatkan Otonomi Tibet (1959-2008)”³⁰. Penelitian ini menelusuri upaya diplomasi Diplomasi Dalai Lama dan juga menggunakan teori-teori yang berdasarkan sifat dan kepribadian Dalai

²⁹ Atika Tursiana, “*Analisis Dinamika Konflik antara Tiongkok dan Tibet*”, Jurnal Hubungan Internasional FISIP Universitas Mulawarman Volume 3, Nomor 4 (Tahun 2015).

³⁰ Lidya Yohana, “*Diplomasi Dalai Lama XIV untuk Mendapatkan Otonomi Tibet (1959-2008)*”, (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2014).

Lama itu sendiri. Tibet yang berada di bawah kekuasaan Pemerintah Tiongkok mengalami diskriminasi dan menjadi minoritas di negaranya sendiri sehingga terjadi pemberontakan kembali oleh Tibetan pada tahun 2008 yang mengakibatkan masyarakat Tibet menjadi korban karena kebrutalan militer Tiongkok. Meskipun Tiongkok melakukan kekerasan, Dalai Lama memilih jalan diplomasi sebagai jalan perdamaian dengan Tiongkok.

Kebijakan diplomasi yang diambil Dalai Lama tersebut tidak lepas dari kepribadian, sifat dan karakteristik Dalai Lama yang dianalisa Yohana menggunakan teori psikoanalisis dan teori *idiosyncratic*. Kemudian, Dalai Lama juga merupakan pemimpin karismatik kerana banyak dikagumi dan dihormati oleh masyarakat internasional. Kepemimpinan Dalai Lama tersebut dianalisa menggunakan teori kepemimpinan karismatik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penggunaan konsep diplomasi serta teori yang digunakan oleh peneliti sebelumnya.

Kajian pustaka ketiga adalah tulisan Michael C. Davis yang berjudul "*Tibet and China's 'National Minority' Policies*"³¹. Dalam penelitian ini, Davis meneliti bagaimana bentuk kebijakan *National Minority* yang diterapkan Tiongkok terhadap Tibet. Tiongkok mulai menerapkan kebijakan *National Minority* terhadap Tibet pada tahun 1951 yang tertuang didalam *The Seventeen-Point Agreement* yang berisikan kesepakatan bilateral antara Tiongkok dan Tibet mengenai hak otonomi terhadap masyarakat asli Tibet. Akan tetapi Tiongkok tidak menjalankan kesepakatan

³¹Michael Davis, *Tibet and China's 'National Minority' Policies*, Foreign Policy Research Institute, Washington, 2012.

sebagaimana mestinya. *The Seventeen-Point Agreement* dipercaya secara luas menjadi prekursor ke bentuk *one country, two systems* model, dengan *high degree of autonomy* yang diterapkan di Hong Kong dan Macau, meskipun Tiongkok menolak untuk menerapkannya di Tibet. Penelitian ini menyatakan bahwa tujuan Tiongkok menerapkan kebijakan *national minority* adalah untuk menyederhanakan status khusus dan konsekuensi kewajiban atas kebijakan tersebut terhadap masyarakat Tibet. Dalai Lama yang berada di pengasingan tidak tinggal diam dengan kebijakan Tiongkok yang tidak segan menggunakan kekerasan. Dalai Lama berupaya memperjuangkan otonomi Tibet dan hak-hak masyarakat Tibet yang menjadi minoritas di tempat asalnya sendiri.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana keadaan masyarakat Tibet di bawah kedudukan Tiongkok dengan kebijakan minoritas nasionalnya sehingga ini berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis dan penelitian ini juga membantu penulis dalam menjelaskan bagaimana bentuk upaya Dalai Lama memperjuangkan Tibet.

Kajian pustaka keempat adalah tulisan Elliot Sperling yang berjudul "*The Tibet-China Conflict: History and Polemics*"³². Buku ini menjelaskan sejarah dan polemik mengenai konflik yang terjadi diantara Tibet dan Tiongkok dari sudut pandang kedua negara. Sperling meneliti bagaimana konflik ini bermula dan memberikan detail dan informasi baru yang berbasis kepada sejarah dan berlatarkan isu krusial mengenai status Tibet. Tulisan Sperling tersebut memberikan peneliti informasi yang lebih banyak mengenai konflik Tibet dan Tiongkok yang bukan hanya

³²Elliot Sperling, *The Tibet-China Conflict: History and Polemics*, Policy Studies 7, The East-West Center Washington, 2004

dari satu sisi saja, akan tetapi mengenai pandangan dari kedua belah pihak mengenai konflik tersebut.

Kajian pustaka kelima adalah tulisan dari Anne-Sophie Bentz yang berjudul “*Symbol and Power: the Dalai Lama As A Charismatic Leader*”.³³ Artikel di dalam jurnal ini meneliti Dalai Lama berdasarkan hubungan antara simbol, kekuatan dan karisma yang dimiliki oleh Dalai Lama. Peneliti menemukan bahwa pengasingan yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap Dalai Lama, membuat Dalai Lama menjadi *summarizing symbol* dengan berubahnya kepentingan simbolis Dalai Lama, baik sebagai manusia maupun sebagai institusi, dari simbol Tibet dan Buddhisme Tibet hingga menjadi simbol kelahiran Tibet, dan yang lebih umum, menjadi simbol Buddhisme di dunia. Bentz menyatakan bahwa dengan berada di pengasingan, Dalai Lama yang awalnya merupakan simbol Buddhisme Tibet, berubah menjadi simbol Tibet, namun dia terus menerus menjadi simbol Buddha yang bukan hanya sebagai simbol Buddhisme Tibet. Akan tetapi, Dalai Lama tidak menginginkan dirinya dianggap sebagai *summarizing symbol* yang kebanyakan masyarakat Tibet masih menginginkannya.

Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Dalai Lama adalah satu-satunya orang yang bisa berperan sebagai pemimpin Tibet. Dengan karisma dan *power* yang dimilikinya sebagai seorang pemimpin Tibet, telah memberi Dalai Lama wewenang baru dalam komunitas Tibet yaitu menjadikannya pemimpin yang unik yang melahirkan Tibet ke dunia, sehingga hal ini membuat Dalai Lama tidak memiliki

³³Sophie Bentz, *Symbol and Power: the Dalai Lama As A Charismatic Leader*, Journal of The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism Volume 18, Number 2, 2012.

alasan menyerah untuk memperjuangkan Tibet. Perbedaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian ini adalah cara pandang penulis terhadap Dalai Lama. Penelitian ini memberikan peneliti pandangan yang berbeda terhadap Dalai Lama dari sisi simbol, kekuatan, dan karisma yang dimiliki Dalai Lama sebagai pemimpin Tibet.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Citizen Diplomacy*

Konsep *citizen diplomacy* berkembang sebagai bentuk respon terhadap meningkatnya keterlibatan warga biasa dalam aktivitas diplomasi. Sherry Mueller melihat *citizen diplomacy* sebagai sebuah konsep yang menyatakan bahwa individu memiliki hak, bahkan kewajiban untuk membantu pembentukan hubungan luar negeri negaranya. Keterlibatan warga dalam hubungan luar negeri digambarkan sebagai proses *one hand-at a time* karena dalam aktivitas tersebut yang berlangsung adalah komunikasi interpersonal warga negara dengan orang yang berbeda. Semakin banyak warga negara yang melakukannya, akan semakin mendukung terjalinnya hubungan baik antara warga negara tersebut secara keseluruhan dengan warga dunia lainnya yang pada akhirnya diharapkan akan berdampak pada terbangunnya hubungan di tingkat negara.³⁴

Artinya, melalui *citizen diplomacy* warga negara mempermudah pekerjaan suatu pemerintah dengan mengkondisikan situasi di level akar agar kondusif bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa warga

³⁴ Brent Mueller dan Eastwood, *A Note on the New A Face of Citizen Diplomacy: Educational City and American University in the Middle East*. (American Foreign Policy Interests, 2007), 443.

negara juga dipandang mampu melakukan hal-hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri, terutama yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintahnya.³⁵

James Marshall menggarisbawahi pentingnya otonomi bagi keterlibatan publik dalam penanganan urusan luar negeri. Menurut Marshall keterlibatan publik adalah sebuah keniscayaan dalam upaya menciptakan perdamaian. Keterlibatan publik ini menurut Marshall merupakan wujud dari demokratisasi dalam urusan luar negeri.³⁶

Dalam pandangan Marshall, proses pembuatan kebijakan luar negeri yang tidak demokratis akan memiliki kelemahan serius dalam memahami esensi permasalahan. Marshall berpendapat bahwa *citizen diplomacy* tidak sepenuhnya terlepas dari koordinasi negara, namun publik yang terlibat seharusnya memiliki otonomi dalam penanganan sebuah isu. Artinya, warga yang terlibat dalam *citizen diplomacy* tidak ditunjuk oleh negara, melainkan mereka yang dinilai representatif oleh masyarakat dalam penanganan isu tertentu.³⁷

1.7.1.1 Tipologi *Citizen Diplomacy*

Dalam membuat tipologi *citizen diplomacy*, Paul Sharp berangkat dari aspek paling mendasar dalam aktivitas diplomasi yaitu representasi. Sharp membuat tipologi *citizen diplomats* berdasar dua dimensi: siapa atau apa yang diwakili oleh *citizen diplomats* dan kepada siapa diplomasi itu ditujukan. Kriteria pertama mengacu

³⁵ Carol, Adam Weinberg and Bellamy, *Educational and Cultural Exchanges to Restore America's Image*. (The Washington Quarterly, 2008), 60.

³⁶ James Marshall, *International Affairs: Citizen Diplomacy*. (American Political Science Review, 1949), 9.

³⁷ *Ibid.*,

pada pihak yang diwakili oleh *citizen diplomats* yang mengacu pada aktor (siapa) maupun gagasan (apa). Pihak-pihak tersebut antara lain: dirinya sendiri; institusi kolektif seperti sub-state, supra-state, dan komunitas trans-state; mungkin juga negara berdaulat pada saat tertentu (*on occasion*); beberapa bidang urusan yang memiliki tujuan yang sama (*single purpose*); atau bisa jadi *citizen diplomats* bertindak mewakili gagasan maupun kebijakan tertentu. Sementara aspek kedua mengacu pada perwakilan dari komunitas internasional yang menjadi target diplomasinya, bisa aktor negara atau non negara.³⁸ Dari dua dimensi inilah Paul Sharp menjelaskan bentuk partisipasi aktor non-negara dalam aktivitas *citizen diplomacy*. Berikut tabel berisi ringkasan dari Tipologi *citizen diplomats* menurut Paul Sharp.

Tabel 1.1 Tipologi Citizen Diplomats Sharp

Tipe	Pihak yang diwakili	Target
Type 1: " <i>citizen diplomats as a go-between messenger</i> "	Negara	Negara
Type 2: " <i>the citizen diplomats as a representative for a sectoral, regional, or local economic interest</i> "	Aktor sub-negara	Non-negara
Type 3: " <i>the citizen diplomats as a lobbyist or advocate for a particular cause</i> "	Gagasan	Negara
Type 4: " <i>the citizen diplomat as a subverter of transformer of existis policies</i> "	Gagasan	Non-negara

³⁸ Paul Sharp, *Making Sense of Citizen Diplomats: The People of Duluth Minnesota, as International Actors*. (International Studies Perspectives. Vol. 2. 131-150. 2001),137.

<i>and/or political arrangements, domestic and/or international”</i>		
Tipe 5: “ <i>the citizen diplomat as a autonomous agent in international relations”</i>	Individu (diri sendiri)	Negara dan Non-negara

Sumber: Paul Sharp, *Making Sense of Citizen Diplomats: The People of Duluth Minnesota, as International Actors*. (International Studies Perspectives. Vol. 2. 131-150. 2001)

- **Tipe pertama : *citizen diplomat as a go-between messenger***

Pada tipe pertama ini. *citizen diplomats* akan mewakili negara untuk dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Pemerintah mengutus *citizen diplomats* karena keahlian mereka menangani masalah negara dan hubungan mereka dengan para pemimpin politik negara lain. Individu yang diutus merupakan diplomat profesional. Akan tetapi status individu yang diutus pemerintah sebagai *citizen diplomat* cenderung berbeda-beda. Ini dikarenakan pemberian tugas yang menjadikan *citizen diplomat* turun menangani masalah tersebut secara eksklusif dan hal ini mengakibatkan perbedaan pandangan terhadap tugas yang dijalankan oleh *citizen diplomats* tersebut. Individu tersebut dinilai bukan sebagai agen eksklusif yang menangani urusan negara.³⁹

Dalam Tipe pertama ini. *citizen diplomats* berperan sebagai *go-between* yang berarti individu tersebut terhubung dengan baik dan merupakan bagian dari aparatur negara. Individu yang diutus negara ini merupakan instrument tambahan untuk

³⁹ *Ibid.*

mencapai tujuan negara yang membawa kepentingan negaranya. Berikut indikator yang menyebabkan *citizen diplomat* dikategorikan dalam tipologi pertama:⁴⁰

-Masih mewakili cara pandang konvensional yang melihat diplomasi sebagai metode komunikasi antar-negara.

-*Citizen diplomat* berperan menjadi perantara untuk negara-negara yang mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi secara langsung dan terbuka dengan aktor internasional lainnya.

-Berlaku ketika dua negara yang sedang berada pada situasi konflik seperti saat terjadi gangguan hubungan diplomatik atau dalam situasi pasca konflik.

-Dengan menggunakan warga negara biasa untuk menjalankan aktivitas diplomasi, pemerintah dapat menghindarkan diri dari dipermalukan dan dapat menggunakan keahlian personal yang dimiliki warga negara untuk menjalankan misi tertentu dalam situasi tersebut.

- **Tipe kedua : *the citizen diplomats as a representative for a sectoral, regional, or local economic interest***

Citizen yang diutus oleh negara ini bergerak untuk kepentingan ekonomi negaranya, dimana negara mengutus konsultan profesional untuk mencari investasi baik di dalam maupun luar negeri, dan masyarakat yang memiliki kepentingan komersial dan misi yang diselenggarakan negara dan badan-badan terkait. Dalam tipe kedua ini, terdapat dua pertimbangan dasar dalam aktivitas *citizen diplomats*, yang pertama adalah bahwa delegasi hanya mewakili kepentingan pribadi perusahaan yang

⁴⁰ *Ibid.*, 137-138.

mereka wakili, meskipun delegasi tersebut dapat dibentuk untuk mewakili kepentingan yang lebih luas lagi seperti kota, provinsi, negara bagian dan negaranya sendiri. Yang kedua adalah kegiatan tersebut tidak ditargetkan pada komutias politik tetapi hanya pada mitra komersial yang berpotensi di dalamnya. Dikarenakan ini merupakan aktivitas diplomasi, maka aktivitas *citizen diplomats* dalam hal yang bersifat komersial konvensional dianggap wajar.⁴¹

Tipe kedua ini mengesampingkan sejarah diplomasi dan menekankan pada diplomasi perdagangan sehingga *citizen diplomats* akan melihat diri mereka sebagai delegasi yang mewakili masyarakat untuk kepentingan ekonomi negaranya. Berikut indikator yang menyebabkan *citizen diplomat* dikategorikan dalam tipologi kedua:⁴²

- Mengacu pada peran aktor sub-negara sebagai inisiator yang menggagas kerjasama dengan aktor internasional untuk memperjuangkan tercapainya kepentingan di tingkat lokal.
- Bisa mewakili kepentingan ekonomi dalam berbagai tingkatan (territorial) maupun ruang lingkup (sektoral).
- Konsultan profesional dan anggota komunitas merupakan aktor-aktor yang mewakili kemampuan untuk menjalankan peran tersebut. Yang dimaksud dengan konsultan profesional disini adalah para ahli yang kompeten dalam memfasilitasi tercapainya kepentingan ekonomi kelompok lokal maupun sektoral tersebut. Aktor-aktor ini menjadi peserta aktif dalam misi luar negeri

⁴¹ *Ibid.*, 138.

⁴² *Ibid.*, 138-139.

yang dibuat pada tingkat negara. Keterlibatan aktor-aktor tersebut menjadi jalan pintas bagi terbangunnya relasi ekonomi lintas negara secara pragmatis.

- **Tipe ketiga : *the citizen diplomat as a lobbyist or advocate for a particular cause***

Citizen diplomats diutus dalam proses lobi yang melobi pemerintahnya sendiri, bukan melobi negara atau pihak asing lainnya. Internasionalisasi proses lobi dengan cara ini terjadi dikarenakan perkembangan komunikasi dan teknologi informasi, dikarenakan kunci dari *citizen diplomacy* adalah memobilisasi massa atau memfokuskan opini masyarakat kepada pihak yang ditekan. *Citizen diplomacy* dalam tipe ini bertujuan untuk melakukan orientasi tertentu kepada pemerintahnya sendiri, institusi diplomat profesional yang dirasa mampu membuat keputusan sesuai yang dituntut oleh *citizen diplomats* atau yang diinginkan oleh orang banyak.⁴³

Berikut indikator yang menyebabkan *citizen diplomat* dikategorikan dalam tipologi ketiga:⁴⁴

-Mengacu pada individu-individu yang memperjuangkan gagasan tertentu. Gagasan yang dimaksud disini sudah berbentuk isu yang telah membuat sekelompok masyarakat mendorong institusi kenegaraan di tingkat nasional maupun internasional untuk merubah kebijakannya.

⁴³ *Ibid.*, 139.

⁴⁴ *Ibid.*, 139-140.

-Pemihakan terhadap isu. Isu-isunya memiliki sifat universal dan berkaitan dengan kebutuhan *lobbying* atau kampanye baik di tingkat nasional maupun internasional.

-Sasaran atau target adalah pihak pemerintah atau institusi diplomasi professional yang dinilai menghasilkan kebijakan yang dinilai tidak populer terkait isu tertentu. Sasaran *lobbying* bisa pemerintah tertentu atau institusi internasional. Tujuannya adalah agar pemerintah atau institusi internasional tersebut merubah kebijakannya sesuai tuntutan mereka. Warga sebuah negara bisa jadi tidak ada hubungannya dengan kehidupan mereka sehari-hari demi mendorong lahirnya kebijakan internasional yang mereka inginkan dalam isu tertentu.

-Identik dengan penggunaan jaringan transnasional, media massa, serta mobilisasi massa dan opini publik untuk merubah kebijakan berbasis negara terkait isu tertentu.

- **Tipe keempat : *the citizen diplomat as a subverter of transformer of existing policies and/or international***

Tipologi keempat ini berangkat dari pandangan English School yang menyebutnya Kantian atau tradisi radikal dalam pemikiran internasional, yang pertama yaitu konsep oleh Wilsonian atau konsep liberal yang cinta perdamaian. Perdamaian ini berlaku untuk orang-orang biasa yang dapat dipercaya namun ini tidak berlaku bagi pemerintah dan orang-orang yang melayaninya. Yang kedua adalah *Citizen diplomat* yang tidak percaya akan pemerintah. Sebagai *Citizen*

diplomats yang merupakan bagian dari pemerintahan, akan sulit bagi *citizen diplomats* yang pada dasarnya memiliki tugas dan tanggung jawab kepada negara, untuk dapat melakukan perlawanan atas kebijakan yang salah yang dilakukan oleh pemerintah.⁴⁵

Berikut indikator yang menyebabkan *citizen diplomat* dikategorikan dalam tipologi keempat:⁴⁶

-Mendukung sebuah gagasan dengan cara mendorong lahirnya tatanan baru yang dinilai lebih akomodatif terhadap apa yang mereka inginkan.

-*Citizen diplomat* memainkan peran sebagai pendukung pihak-pihak yang memiliki orientasi untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan atau perencanaan politik baik di tingkat domestik maupun internasional.

-Aktifitas ini dilakukan dalam rangka menunjukkan oposisi atau protes kepada pemerintah atau tatanan internasional yang ada dengan membentuk jaringan transnasional.

- **Tipe kelima : *the citizen diplomat as an autonomous agent in international relations***

Dalam tipe kelima ini, *citizen diplomat* bertindak untuk organisasi yang lebih otentik mewakili kepentingan dari semua orang. Tipe ini menyarankan individu yang akan melakukan diplomasi merupakan individu yang memiliki kontrol dan sumber daya kapasitas pribadinya yang cukup untuk bertindak di lingkungan internasional

⁴⁵ *Ibid.*, 140

⁴⁶ *Ibid.*, 140-141.

dan diakui oleh orang lain, terutama negara-negara, sebagai faktor utama pelaksanaan hubungan internasional, dan terutama sekali mewakili diri sendiri. Dalam tipe kelima ini, kekayaan adalah sumber yang jelas yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Namun kekayaan bukan satu-satunya sumber daya yang menjadikan individu tersebut dapat bertindak mandiri sebagai *citizen diplomats*.⁴⁷

Sebagai contoh, Nelson Mandela telah menunjukkan bahwa otoritas moral dapat membawa perubahan didalam politik internasional. Jimmy Carter juga telah menunjukkan bahwa kombinasi otoritas moral, kemudahan mendapatkan informasi, keahlian, dan kesediaan untuk meluangkan waktu. Dalam kedua kasus tersebut terlihat bahwa kapasitas moral merupakan hal yang juga diperhitungkan.⁴⁸

Pada tipe kelima ini, *citizen diplomats* juga merupakan diplomat professional yang menggunakan keahlian dan posisinya yang tidak mewakili pemerintahan akan tetapi memiliki tujuan untuk kepentingan orang banyak dan ini bukan merupakan kepentingan pribadinya. Dalam hal ini, diplomat professional akan bertindak tidak jauh dari nilai-nilai atau kebijakan yang ada dipemerintahannya. Diplomats professional bisa saja tidak dianggap, hanya sebagai alat keperluan eksternal negara, dan diplomat professional bisa dikatakan melakukan sesuatu mendekati diplomasi internal yang sejenis dengan apa yang dilakukan diplomat yang berada dibawah kerangka pemerintahan. Berikut indikator yang menyebabkan *citizen diplomat* dikategorikan dalam tipologi kelima:⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*, 141.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, 141-142.

-Tidak mewakili siapapun kecuali diriya sendiri.

-Mengacu pada individu yang dengan segenap sumber daya dan kapasitas pribadinya diterima dan bahkan sangat diperhitungkan dalam lingkungan internasional, termasuk oleh negara. Alasan mengapa individu mampu bertindak otonom sebagai seorang diplomat dikarenakan kekayaan dan kapasitas moralnya mampu mendukung keberadaannya sebagai figure politik yang berpengaruh.

-Dikategorikan sebagai seorang agen otonom dalam *citizen diplomacy* jika mereka bertindak diluar kerangka kebijakan pemerintah yang diwakilinya dan juga kepentingan personalnya. Hal ini biasanya terlihat jelas dalam situasi krisis ketika langkah-langkah strategis bukan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah mereka. Perluasan peran seperti yang ditunjukkan oleh para *citizen diplomat*, termasuk para warga yang professional (termasuk para diplomat sekalipun), telah menempatkan identitas dan batasan kedaulatan dalam posisi yang dinamis atau bisa berubah-ubah.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan tipologi *citizen diplomacy* yang kelima dalam menjelaskan upaya Dalai Lama sebagai *citizen* dalam mendapatkan otonomi Tibet dari Tiongkok.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan

prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁵⁰ Penelitian ini berdasarkan tujuannya menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis di mana analisis dilakukan dengan mengkaji fenomena yang diangkat menjadi lebih rinci.⁵¹

1.8.2 Batasan Penelitian

Melihat upaya diplomasi yang dilakukan oleh Dalai Lama dalam mendapatkan otonomi Tibet dari Tiongkok, batasan penelitian ini dimulai dari tahun 2011 hingga 2017 karena pada tahun 2011 Dalai Lama secara resmi menyatakan berhenti menjadi bagian dari pemerintahan dan memulai diplomasi nya dengan status sebagai warga negara hingga tahun 2017.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan dan dianalisis.⁵² Sementara itu, unit eksplanasi merupakan unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisis. Kedua variabel ini saling mempengaruhi, atau secara umum variabel independen dikenal sebagai variabel penyebab dan variabel dependen dikenal sebagai variabel akibat.⁵³ Selanjutnya, level analisis atau tingkat analisis merupakan tingkat atau posisi dari unit yang dijelaskan. Level analisis

⁵⁰ Jane Ritchie dan Jane Lewis, *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*. (London: Sage Publication, 2003). 3.

⁵¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persamda Press, 2008). 186.

⁵² Mohtar Ma'oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta: LP3ES, 1990). 108.

⁵³ *Ibid*, 108.

akan membantu peneliti dalam menjelaskan area penelitian yang akan dijelaskan.⁵⁴ Dari penjelasan diatas, unit analisis penelitian ini adalah individu dan unit eksplanasinya adalah upaya mendapatkan otonomi Tibet. Sedangkan tingkat analisisnya berada pada sistem internasional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dengan mempelajari penelitian atau informasi-informasi yang terkait pada isu yang ada dalam penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui laporan-laporan berupa dokumen-dokumen dari situs resmi oleh Pemerintah Tibet dan Tiongkok. Data sekunder didapatkan melalui buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar, situs, maupun laporan penelitian yang berhubungan dengan topik dan permasalahan yang diangkat.

1.8.5 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses keberlanjutan yang membutuhkan penelusuran data-data yang telah didapatkan secara mendalam. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.⁵⁵ Di dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan akan dikelompokkan dan diinterpretasikan sehingga mendapatkan sumber-sumber relevan yang dapat menjelaskan isu yang dibahas penulis.

⁵⁴ *Ibid*, 35.

⁵⁵ Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research 3e*. (California: Sage Publication Inc, 1999). 150.

Penelitian ini menggunakan konsep *Citizen Diplomacy* untuk menjelaskan peran Dalai Lama sebagai warga negara yang melakukan diplomasi untuk mendapatkan otonomi Tibet dari Tiongkok.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB II : Otonomi Tibet dari Tiongkok

Bab ini menjelaskan bagaimana hubungan Tibet dan Tiongkok hingga terjadinya pergolakan diantara kedua negara ini yang menyebabkan Tibet menuntut otonomi negaranya dari Tiongkok.

BAB III : Dalai Lama sebagai Agen *Citizen Diplomacy*

Bab ini menjelaskan bagaimana Dalai Lama terpilih sebagai pemimpin spiritual dan pemimpin Tibet, hingga Dalai Lama berhenti dari tanggung jawab politik dan kemudian menjadi agen *Citizen Diplomacy* dalam mendapatkan otonomi Tibet dari Tiongkok.

BAB IV : Analisis Upaya Diplomasi Dalai Lama untuk mendapatkan Tibet dari Tiongkok

Bab ini berisi analisis terkait upaya diplomasi Dalai Lama untuk mendapatkan otonomi Tibet dari Tiongkok, menggunakan konsep yang sudah dijelaskan diatas.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.

